BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kompleksitas Hubungan Internasional barangkali yang telah memberikan akses kuat terhadap alasan, mengapa kita tertarik untuk mempelajari hubungan internasional yang tercarmin dalam hubungan-hubungan antara negara-negara sejak akhir perang dunia kedua semakin lama semakin kompleks. Kompleksitas ini disebabkan oleh tiga hal pokok. *Pertama*, multiplikasi pelaku-pelaku dibidang hubungan internasional, diantara mana persengketaan mungkin timbul, multiplikasi ini tidak hanya dalam artian jenis pelaku akan tetapi juga jumlah setiap jenis pelaku. *Kedua*, multiplikasi jumlah masalah-masalah yang dapat menjadi sebab dari persengketaan. *Ketiga*, multiplikasi cara dan peralatan yang dapat digunakan untuk memecahkan persengketaan di masa depan (Daoed Joesoef, (1989) dalam Sitepu, 2011 : 5).

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang bertetangga. Kedua negara memiliki sejarah hubungan bilateral yang panjang. Hubungan kedua negara ini pun kerap mengalami pasang surut. Pada masa pemerintahan orde lama, hubungan kedua negara sempat mengalami masa yang buruk. Hubungan Indonesia Malaysia yang pertama kali dikenal dalam konstelasi politik regional, diawali dengan konfrontasi Indonesia vs Malaysia. Perbedaan sejarah kolonialisasi membuat Rezim Soekarno merasa tidak puas atas terbentuknya negara Malaysia pada dekade tahun 1960-an. Penyebarluasan imperialisme barat

yang dinilai Soekarno memberikan pengaruh negatif terhadap kelangsungan negara-negara Asia Tenggara akhirnya membentuk suatu persepsi dan hubungan yang kurang baik dengan Malaysia.

Beberapa kontroversi terus menerpa hubungan Indonesia dengan Malaysia sebelum pemerintahan Orde Baru muncul. Pada saat era Presiden Soekarno, politik "Ganyang Malaysia" yang dikeluarkan sebagai senjata untuk memberontak sekaligus menentang pembentukan persemakmuran Inggris, federasi Malaysia. Malaysia dinilai sebagai bentuk pengaruh imperialisme barat yang disebarkan oleh Inggris, dan kemudian, memberikan suatu ide "Konfrontasi" yang bersifat radikal terhadap kebijakan luar negeri Indonesia yang dikeluarkan Presiden Soekarno pada masa Orde Lama. Pemulihan Hubungan Indonesia-Malaysia atas konfrontasi yang dibuat oleh Soekarno, diakhiri pada tahun 1967 dan sekaligus menggantikan posisi pemerintahan Soekarno yang jatuh karena pemberontakan G-30S PKI, kemudian berganti menjadi pemerintahan Soeharto yang sekaligus merupakan awal mula dari pemerintahan Orde Baru. Upaya menggalakkan pemulihan hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia pada khususnya dan Indonesia-PBB pada umumnya dicerminkan melalui kembalinya Indonesia dalam keanggotaan PBB.

Pada masa reformasi, perjalanan hubungan diplomatik antar negara bertetangga juga tidak selalu berjalan mulus dan lancar. Pada tahun 2002 hubungan Indonesia dan Malaysia sempat memburuk ketika kepulauan Sipadan dan Ligitan diklaim oleh Malaysia sebagai wilayah mereka dan berdasarkan keputusan mahkamah internasional di Den Haag Belanda, bahwa Sipadan dan

Ligitan merupakan wilayah Malaysia (http://www.suaramerdeka.com. Diakses 8-02-2012).

Pada 2005 terjadi sengketa mengenai batas wilayah dan kepemilikan Ambalat. Oktober 2007 terjadi konflik akan kepemilikan lagu *rasa sayange* yang digunakan Departemen Pariwisata Malaysia untuk mempromosikan kepariwisataan Malaysia dan beberapa klaim budaya lainnya. Kasus penganiayaan terhadap TKI di Malaysia pun tidak terlepas dari beberapa masalah dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia (http://www.tempo.co.diakses 08-02-2012).

Permasalahan mengenai TKI di Malaysia mendapat banyak perhatian di dalam negeri, terutama pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang terpilih sebagai Presiden ke enam Republik Indonesia yang menjabat selama dua periode yaitu periode pertama ditahun 2004-2009 yang berpasangan dengan Jusuf Kalla serta periode ke dua ditahun 2010-2014 yang berpasangan dengan Boediono.

Tiga gelombang utama pergerakan TKI ke Malaysia telah terjadi selama lebih dari 40 tahun, menunjukkan betapa TKI memainkan peranan penting dalam perekonomian Malaysia. Di tahun 1970-an dan 1980-an ketika peraturan imigrasi Malaysia masih terbatas. Gelombang pertama TKI banyak dipekerjakan di sektor perkebunan atau pertanian, diikuti sektor industri pengolahan dan jasa. Selama gelombang kedua migrasi tenaga kerja tahun 1980-an, TKI lebih banyak dipekerjakan di sektor industri manufaktur, pengolahan dan sektor jasa tidak formal karena adanya gelombang besar migran legal dan ilegal pada waktu itu.

Kebijakan imigrasi baru yang aktif sekitar tahun 1991-1992 memasukkan retribusi kepada penempatan tenaga kerja asing. Dalam upaya mensahkan tenaga kerja ilegal di sektor domestik, konstruksi, pertanian, industri pengolahan atau manufaktur dan jasa, program amnesti dijalankan selama periode ini. Kombinasi antara krisis keuangan Asia tahun 1997, dengan pelaksanaan kebijakan nasional yang sangat ketat untuk melarang masuknya tenaga kerja ilegal, memperlambat masuknya tenaga kerja dan menstabilkan arus TKI ke Malaysia (www.iom.int. diakses 25-01-2012).

Beberapa permasalahan terkait kekerasan yang di alami oleh TKI di Malaysia yang banyak mendapat perhatian antara lain kasus Siti Hajar yang disiksa oleh majikannya serta gaji yang tidak dibayarkan selama 34 bulan pada tahun 2009. Dalam penyelesaian masalah tersebut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada waktu itu Erman Suparno melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Sumber Manusia Malaysia Datuk S. Subramaniam di sela-sela pertemuan *Internasional Labour Conference* (ILC) ke-98 di Jenewa Swiss. Dalam pertemuan itu kedua pihak sepakat untuk segera membahas perbaikan perjanjian kerjasama (MoU) guna meningkatkan perlindungan TKI di Malaysia untuk mencegah terulangnya kasus seperti yang di alami Siti Hajar (beritasore.com.di akses 01-02-2012).

Berbagai permasalahan TKI yang kerap kali mengganggu hubungan bilateral kedua negara dalam situasi yang kurang harmonis. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui lembaga terkait memutuskan lebih memilih untuk menyelesaikan permasalahan TKI melalui mekanisme baik kerjasama multilateral

yaitu melalui ASEAN maupun kerangka bilateral atau kerjasama langsung kedua negara.

Dalam kerjasama multilateral, upaya-upaya menyelesaikan permasalahan yang menyangkut TKI ditemuh melalui pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN. Selama KTT ASEAN yang ke-12 tanggal 13 Januari 2007 di Cebu, Filipina, pemimpin-pemimpin negara anggota ASEAN menandatangani Deklarasi Perlindungan dan Promosi Hak-Hak Tenaga Kerja. 6 negara-negara anggota ASEAN yang terdiri dari negara pengirim dan negara tujuan tenaga kerja, mendeklarasikan bahwa mereka akan mengambil langkah-langkah untuk memberikan perlindungan dan mempromosikan hak-hak tenaga kerja. Sesuai dengan hukum, peraturan, dan kebijakan nasional, negara-negara anggota ASEAN diminta untuk mengambil tindakan yang bermanfaat bagi tenaga kerja dengan mempromosikan pekerjaan yang layak, manusiawi, produktif, bermartabat dan bergaji memadai serta menciptakan reintegrasi dan pembangunan program sumber daya manusia bagi tenaga kerja sekembalinya mereka ke Negara masing-masing. Negara-negara anggota ASEAN juga akan bekerja sama memperkuat kapasitas mereka, berbagi pengalaman terbaik dan memfasilitasi pertukaran informasi antar Negara untuk mencegah dan menertibkan penyelundupan manusia dan perdagangan orang (www.iom.int. diakses 25-01-2012).

Permasalahan TKI yang sering mengganggu hubungan Indonesia-Malaysia membuat kedua negara harus mengganti kebijakan menyangkut permasalahan TKI di Malaysia. Meskipun masalah yang dialami TKI bervariasi menurut sektor, tapi masih terlihat permasalahan umumnya yang dialami oleh

TKI. dari keluhan-keluhan yang diterima KBRI di Malaysia dari 2005 sampai 2007. Masalah utama berbeda dari tahun ke tahun, namun ada dua kategori utama masalah yang nampak jelas: (1) masalah kekerasan termasuk penyiksaan, penganiayaan seksual, pencambukan, dan pemerkosaan; dan (2) masalah hak TKI, termasuk gaji yang tidak dibayarkan, beban kerja yang luar biasa, tidak ada libur, penipuan, pengusiran oleh majikan, kondisi kerja yang tidak manusiawi. Dua kategori masalah ini saling terkait, masalah dengan hak-hak TKI sering menimbulkan masalah-masalah lain yang berelasi dengan kekerasan.

Penyitaan paspor dalam banyak kasus sangat membatasi gerakan TKI karena mereka harus membawa ijin kerja mereka setiap saat atau beresiko dipenjara. Banyak PRT menyatakan bahwa mereka tidak memiliki akses ke paspor mereka. Kemungkinan besar alasan utama TKI tidak berani meninggalkan rumah majikan mereka karena takut dipenjara dan dideportasi.

Sejak tanggal 26 Juni 2009, Indonesia telah mengeluarkan moratorium penempatan TKI yang bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) di Malaysia. Larangan TKI bekerja di Malaysia tahun 2009 akan dicabut setelah ada "Surat Kesungguhan" ditandatangani antara kedua negara bulan Mei 2010. Surat kesungguhan menetapkan bahwa TKI berhak memperoleh satu hari libur per minggu dan menyimpan paspornya sendiri selama berada di Malaysia. Namun, kedua pemerintah tidak mampu memecahkan masalah upah minimum tenaga kerja migran. Secara prinsip Pemerintah Malaysia telah menyetujui langkah-langkah yang diusulkan Pemerintah Indonesia, termasuk memberikan hari libur bagi TKI yang bekerja di sektor domestik sehari seminggu, kenaikan gaji secara

periodik, menyimpan paspor mereka sendiri selama kontrak mereka dan mendapat ganti biaya transportasi oleh majikan mereka. Pemerintah Indonesia telah mengusulkan kenaikan upah minimun TKI dari 500 Ringgit menjadi 800 Ringgit per bulan. Dan pada tanggal 1 Desember 2011 moratorium resmi dicabut oleh pemerintah Indonesia, namun MENAKERTRANS Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa proses penempatan TKI masih menunggu hingga Maret 2012 (Tempo 1-12-2011) (www.iom.int. diakses 25-01-2012).

Pada tahun 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Instruksi Presiden No. 6 tahun 2006 tentang Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja untuk menanggapi kasus kekerasan terhadap TKI di Malaysia. Isi Intruksi Presiden ini untuk memperkuat fungsi diplomatik Indonesia dalam melindungi TKI dengan menempatkan Atase Tenaga Kerja di negara-negara tujuan kunci bagi TKI. Termasuk didalamnya advokasi dan pembelaan TKI serta penguatan fungsi perwakilan RI dalam perlindungan TKI (www.iom.int. diakses 25-01-2012).

Ditahun 2006 juga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mengeluarkan Peraturan Presiden No. 81/2006 tentang Pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) diluar negeri, dimana tempat tujuan para TKI bekerja guna lebih memaksimalkan perlindungan terhadap para TKI Indonesia diluar negeri dan diharapkan mampu mengurangi permasalahan yang seringkali menimpa para TKI diluar negeri (http://www.disnakertransbanten.net/?link=dtl&id=92.Diakses tanggal 7-02-2012).

Permasalahan TKI juga disebabkan banyaknya TKI ilegal yang yang terdapat di Malaysia. Pada mulanya para TKI ini merupakan TKI legal, namun berbagai kendala seperti penyitaan paspor oleh majikannya serta permasalahan perizinan yang sulit menyebabkan para TKI ini menjadi illegal yang menyebabkan mereka *overstay*, belum lagi para TKI yang tidak memiliki dokumen lengkap. Untuk mengatasi permasalahan ini pemerintah Malaysia menetapkan kebijakan pemutihan terhadap para TKI ilegal. Sebanyak 1,2 juta Tenaga Kerja Indonesia ilegal dan yang tidak berdokumen lengkap di Malaysia akan diputihkan. Pemutihan dimulai pada 1 Agustus 2011 dimulai dari TKI yang berada di wilayah semenanjung Malaysia dan batas akhir pada tanggal 11 Oktober 2011.

Bagi para TKI yang terkena hukuman mati di luar negeri, pemerintah Indonesia membentuk satuan tugas (satgas) yang bertugas menangani kasus tersebut. Satgas di bentuk pada tanggal 7 Juli 2011 berdasarkan keputusan presiden nomor 17 tahun 2011, satgas ini merupakan organisasi *ad hoc* yang bertugas selama 6 bulan untuk membantu memperjuangkan penyelesaian permasalahan TKI khususnya dibidang hukum yang berkoordinasi langsung di bawah KEMENKO POLHUKAM (setkab.go.id. diakses 02-02-2012).

Forum konsultasi tahunan antara Indonesia dan Malaysia dalam menyikapi hubungan bilateral ke-8 yang dilaksanakan di pulau Lombok NTB pada hari kamis tanggal 20 Oktober 2011 antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak membahas dua agenda utama yaitu; *pertama*, membahas sejumlah isu menyangkut hubungan bilateral kedua Negara

dan dengan semangat serta niat baik mencari solusi yang tepat, *kedua*, selalu mencari dan menciptakan peluang-peluang baru bagi kerjasama diberbagai bidang yang membawa manfaat bagi kedua Negara (eksposnews.com.diakses 02-02-2012).

Dalam menyikapi permasalahan TKI ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan hubungan yang saling membutuhkan antara Indonesia dan Malaysia. Dalam pembukaan pidatonya di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu 1 September 2010. Mengatakan "Hubungan itu sudah terjalin ratusan tahun. Kita punya tanggung jawab sejarah, untuk memelihara dan melanjutkan tali persaudaraan ini dan mungkin yang paling erat dibanding negara-negara lain".

Tidak hanya itu, Yudhoyono juga mengingatkan jika hubungan Indonesia dan Malaysia menjadi pilar penting dalam keluarga besar ASEAN. "ASEAN bisa tumbuh pesat selama empat dekade terakhir ini, antara lain karena kokohnya pondasi hubungan bilateral Indonesia-Malaysia".

Presiden Yudhoyono juga menyinggung mengenai ada sekitar dua juta warga Indonesia yang bekerja di Malaysia. Jumlah ini adalah jumlah buruh migran Indonesia yang terbesar di luar negeri. Keberadaan mereka membawa keuntungan baik bagi Indonesia maupun Malaysia. Sementara di sektor pendidikan, tercatat sekitar 13.000 pelajar dan mahasiswa Indonesia belajar di Malaysia. Sebaliknya, di Indonesia ada 6.000 mahasiswa Malaysia.

Serta nilai ivestasi kedua Negara, lima tahun terakhir ini ada 285 proyek yang didanai perusahaan-perusahaan Malaysia. Jumlah investasi mencapai US$ 1.2 miliar. Sebaliknya investasi Indonesia di Malaysia berjumlah US$ 534 juta.

Jumlah perdagangan kedua negara telah mencapai US$ 11,4 miliar pada tahun 2009. Malaysia merupakan investor ke-8 dari seluruh investasi asing yang hadir di Indonesia. Selama 2004-2009, jumlah modal dari Malaysia yang telah ditanam di Indonesia mencapai angka USD15 miliar. Dari tahun ke tahun, terjadi pertumbuhan tingkat perdagangan antara Indonesia-Malaysia yang mencapai rata-rata 12,7 persen. " Hal ini menunjukkan bahwa hubungan ekonomi Indonesia-Malaysia sungguh kuat," ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (http://www.detikpos.net. diakses 08 oktober 2011).

Dalam menjalankan hubungan bilateral dua negara, Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah memiliki suatu mekanisme komunikasi yang sifatnya langsung dan akrab serta kerjasama yang cukup solid dalam menangani berbagai isu yang berkembang, baik ditingkat bilateral, regional maupun global. Pada kesempatan pertemuan bilateral beberapa waktu yang lalu, Pemimpin kedua negara juga telah sepakat untuk terus menjaga kesinambungan hubungan Indonesia-Malaysia tidak sekedar hanya meneruskan hubungan sebagaimana selama ini, namun dalam kadar yang lebih tinggi atau meningkat.

Hal ini telah dibuktikan oleh Pemimpin kedua negara dimasa lampau hingga kini yang memiliki tradisi saling kunjung dan interaksi yang intensif. Sesuai tradisi selama ini, Indonesia merupakan negara tujuan pertama kunjungan kenegaraan Perdana Menteri (PM) Malaysia yang baru dilantik. Sebaliknya, Presiden RI terpilih juga melakukan kunjungan pertama ke Malaysia. Hal ini bukan sekedar karena kedekatan geografis, namun terlebih dari itu karena adanya keterikatan emosional yang tidak terpisahkan.

Menurut Yudhoyono, dalam kunjungan yang terakhirnya ke Malaysia, dia berhasil mencapai kesepakatan dengan pemerintah jiran itu, mengenai pemberian dan perlindungan Hak bagi tenaga kerja Indonesia di Malaysia. "Saya dan Perdana Menteri Malaysia sering berkomunikasi secara langsung, disamping forum konsultasi tahunan yang kami lakukan, untuk memastikan bahwa isu-isu bilateral ini dapat kita kelola dan carikan jalan keluarnya dengan baik" (http://www.detikpos.net. diakses 08 oktober 2011).

Tradisi saling kunjung tersebut sangat berarti dan memberikan isyarat positif dalam hubungan kedua negara, termasuk hubungan antar masyarakatnya. Dan hubungan baik tersebut diharapkan dapat berlanjut dalam jangka panjang ke depan. Keadaan inilah yang sebenarnya membuat kedua masyarakat bangsa harus menjalin hubungan yang lebih erat dengan intensitas komunikasi yang lebih tinggi.

Faktor psikologis yang terkait dengan unsur pemilihan alternatif dengan berdasarkan suatu anggapan bahwa pembuatan keputusan adalah merupakan suatu proses intelektual rasional, maka tujuannya secara eksplisit dan hierarkis dapat dirumuskan sebagai peluang yang diberikan oleh lingkungan. Meskipun lingkungan (internasional) akan mempersulit pembuatan pernyataan yang tegas dan jelas dan penyusunan tujuan-tujuan, pembuatan keputusan atau kebijaksanaan luar negeri, pertama-tama ia akan bertindak sesuai dengan acuan motivasi yang pernah mengantarkannya pada peran semacam itu.

Terdapat beberapa faktor dan pertimbangan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri

melaui jalur diplomasi yang menyangkut penyelesaian permasalahan TKI di Malaysia. *Pertama,* persoalan sejarah Indonesia dan malaysia yang mempunyai hubungan sejarah, budaya dan kekerabatan yang sangat erat. *Kedua,* hubungan Indonesia dan Malaysia adalah pilar penting dalam keluarga besar ASEAN. *Ketiga,* jumlah TKI di Malaysia yang mencapai hampir dua juta orang. *Keempat,* ada sekitar 13.000 pelajar dan mahasiswa Indonesia belajar di Malaysia, dan 6.000 mahasiswa Malaysia belajar di Indonesia. *Kelima,* jumlah wisatawan Malaysia yang berkunjung ke Indonesia adalah ketiga terbesar dengan jumlah 1,18 juta orang, dari total 6,3 juta wisatawan mancanegara. *Keenam,* jumlah investasi Malaysia di Indonesia 5 tahun terakhir (2005-2009) 285 proyek investasi, berjumlah US$ 1.2 miliar, dan investasi Indonesia di Malaysia berjumlah US$ 534 juta.

Dapat dilihat bahwa berbagai pertimbangan inilah yang menjadi faktor pertimbangan Presiden Yudhoyono dalam pengambilan kebijakan luar negeri yang ditempuh melalui kerangka diplomasi dalam menyelesaikan permasalahan TKI di Malaysia. Presiden Yudhoyono jelas mengedepankan asas pertemanan serta mengesampingkan *power* dalam menyelesaikan permasalahan TKI.

Dapat dilihat bahwa ada beberapa variabel yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan atau kebijakan luar negeri, namun variabel *idiosyncratic* merupakan pandangan atau teori pendekatan yang lebih mudah untuk di jelaskan dalam negara yang yang memiliki sifat atau sistem pemerintahan yang demokratik dicerminkan didalam kondisi yang kompetitif.

Berbagai kebijakan yang ditempuh oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menangani permasalahan TKI di Malaysia tidak terlepas dari peranan *Idiosyncartic* Susilo Bambang Yudhoyono. Sesuai dengan permasalahan diatas maka peneliti merangkum berbagai kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dikeluarkan untuk melindungi TKI diluar negeri yang dipengaruhi oleh *idiosyncratic* beliau, yaitu :

1. Dikeluarkannya InPres No. 6/2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
2. Dikeluakannya PerPres No. 81/2006 tentang Pembentukan BNP2TKI Di luar Negeri.
3. Dikeluakannya moratorium oleh KEMENAKERTRANS yang berlaku pada tahun 2009 dan berakhir pada bulan Mei 2010.
4. Adanya forum konsultasi tahunan antara Presiden Yudhoyono dengan Perdana Menteri Malaysia yang dimanfaatkan Presiden Yudhonono untuk membahas isu-isu bilateral kedua negara termasuk permasalahan TKI.
5. Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) dibawah koordinasi KEMENKO POLHUKAM untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi oleh para TKI. Dibentuknya SATGAS atas KePres No 17/2011.

Berbagai kebijakan yang diambil oleh Presiden Yudhoyono tersebut dipengaruhi juga oleh persepsi dan interpretasi beliau terhadap kejadian serta

fakta yang didapat dilapangan dan mengeluarkan kebijakan yang diharapkan mampu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan menyangkut TKI.

Oleh karena itu dari permasalahan yang dikemukakan di atas, peneliti sangat tertarik untuk menjadikan masalah ini sebagai bahan penelitian dan pembuatan skripsi dengan judul :

"Pengaruh *Idiosyncratic* Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Terhadap Penyelesaian Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Malaysia (Tahun 2004-2011)".

Penelitian ini dibuat berdasarkan beberapa mata kuliah pada Program Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, yaitu :

1. Pengantar Hubungan Internasional, membahas mengenai bagaimana bentuk-bentuk interaksi antar Negara dan aktor non-negara. Yang melibatkan kontak fisik secara langsung, interaksi ekonomi, penggunaan kekuatan militer dan diplomasi, baik secara publik maupun diplomasi.
2. Politik Internasional, melaui kuliah ini dijelaskan bagaimana suatu Negara berinteraksi dengan Negara lainnya, dimana dalam interaksi tersebut masing-masing Negara membawa kepentingannya yang dituangkan dalam kebijakan luar negerinya masing-masing.
3. Analisis Politik Internasional, mata kuliah ini menggambarkan mengenai politik luar negeri suatu Negara, termasuk respond dan

kebijakan yang terkandung didalamnya serta tindakan-tindakan yang dilakukan oleh suatu Negara terhadap lingkungan eksternalnya.

4. Politik Luar Negeri Republik Indonesia. Pada mata kuliah ini mempelajari bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia yang dimana kebijakan ini menggambarkan apa yang menjadi tujuan yang ingin dicapai pemerintah Indonesia.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka peneliti mengajukan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis kepribadian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berdasarkan teori *idiosyncratic* ?
2. Apa saja kebijakan yang diambil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam penyelesain permasalahan TKI di Malaysia ?
3. Bagaimana evaluasi pengaruh *idiosyncratic* Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam mengeluarkan kebijakan terhadap penyelesaian permasalah TKI di Malaysia ?
4. Bagaimana *idiosyncratic* Susilo Bambang Yudhoyono mempengaruhi prospek hubungan bilateral Indonesia-Malaysia ?

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dalam pemaparan penelitian ini, penulis akan membatasi permasalahan pada tahun 2004

karena pada waktu itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan terpilih menjadi Presiden untuk periode pertama masa jabatannya serta tahun 2011 adalah masa dimana berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam upaya penyelesaian permasalahan mengenai TKI di Malaysia termasuk pencabutan moratorium TKI ke Malaysia.

1.4 Perumusan Masalah

Bertolak dari identifikasi masalah dan pembatasan masalah tersebut diatas, maka peneliti mengajukan perumusan masalah yaitu :

"Bagaimana *Idiosyncratic* Susilo Bambang Yudhoyono Mempengaruhi Penyelesaian Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia ?"

1.5 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui Bagaimana analisis kepribadian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berdasarkan teori *idiosyncratic* ?
2. Mengetahui Apa saja kebijakan yang diambil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam penyelesain permasalahan TKI di Malaysia ?

3. Mengetahui Bagaimana evaluasi pengaruh *idiosyncratic* Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam mengeluarkan kebijakan terhadap penyelesaian permasalah TKI di Malaysia ?
4. Mengetahui bagaimana *idiosyncratic* Susilo Bambang Yudhoyono mempengaruhi prospek hubungan bilateral Indonesia-Malaysia ?

1.5.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan teoritis: memahami studi politik internasional serta analisis politik internasional pada umumnya, dan perkembangan hubungan Indonesia-Malaysia serta sejauh mana pengaruh *idiosyncratic* Susilo Bambang Yudhoyono menyikapi permasalahan kedua Negara khususnya.

Kegunaan pragmatis : hasil-hasil penelitian diharapkan akan memberikan sumbangan bagi perkembangan teori-teori ilmu Hubungan Internasional serta dapat memberi wawasan bagi peneliti lainnya.

1.6 Kerangka Pemikiran, Hipotesis, dan Definisi Operasional

1.6.1 Kerangka Pemikiran

Dalam hubungan internasional dewasa ini telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, aktor yang berada di dunia internasional bukan lagi di dominasi oleh *state actor* melainkan *non state actor* juga dapat berada didunia internasional dan memainkan perannya. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam pola hubungan internasional.

The dictionary of world politic mengartikan hubungan internasional sebagai suatu istilah yang digunakan untuk melihat seluruh interaksi antara aktor Negara dengan melewati batas-batas Negara. Hubungan internasional akan berkaitan dengan segala bentuk interaksi antara masyarakat Negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun oleh warga Negaranya. Hubungan internasional juga mencakup pengkajian terhadap politik luar negeri dan politik internasional dan meliputi segala segi hubungan diantara berbagai Negara, baik yang bekaitan dengan politik, sosial, ekonomi dan sebagainya (Perwita & Yani, 2005 : 4).

Sementara Mas'oed memberikan definisi hubungan internasional yang lebih terperinci yaitu :

> " hubungan internasional juga didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antar beberapa aktor yang berpartisispasi dalam politik internasional, yang meliputi Negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan subnasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu. Tujuan dasar studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor Negara maupun non-negara, didalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik serta interaksi dalam organisasi internasional" (Mas'oed, 1994 : 28).

Namun bagi pandangan (David N. Farnworth, 1988 : 1) yang mengemukakan bahwa ada dua alasan utama yang paling umum digunakan untuk mengetahui orang tertarik untuk mempelajari hubungan internasional.

> *Pertama*, keinginan untuk mengetahui lebih banyak tentang dampak atau implikasi yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi di bidang internasional bagi kehidupan kita atau serta kemungkinan pengaruhnya manakala Negara-negara yang mungkin lepas kontrol atas alat-alat yang digunakan. *Ke dua*, diperuntukkan bagi kepentingan penelitian hubungan internasional dapat mengajarkan kita bahwa suasana persengketaan atau

> konflik tidak selamanya bersifat langgeng yang terkadang bisa mengancam kehidupan kita (Sitepu, 2011 : 6).

Menurut Perwita dan Yani Hubungan internasional merupakan interaksi antar dua aktor yang tindakannya memiliki konsekuensi penting terhadap faktor lain dari luar jurisdiksi efektif unit positif nya (Perwita dan Yani, 2005 : 7).

Pada prinsipnya, tujuan studi hubungan internasional adalah untuk mempelajari perilaku para aktor seperti misalnya Negara, maupun yang bukan termasuk kategori sebuah Negara (organisasi internasional) di dalam arena transaksi internasional. Perilaku itu bisa berwujud perang, konflik, kerjasama dalam organisasi internasional (Mas'oed, 1990 : 32).

Dalam melihat hubungan antara Indonesia-Malaysia yang kerap kali kurang harmonis dimana terdapat tekanan dari dalam negeri Indonesia sendiri yang menuntut tindakan tegas dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memiliki otoritas tertinggi dalam pengambilan kebijakan dalam menyikapi hubungan Indonesia-Malaysia, tentu memiliki berbagai pertimbangan sebelum mengambil langkah kongkrit dalam kebijakannya termasuk pertimbangan mengenai kepentingan nasional bangsa dan Negara Indonesia.

Kusumohamidjojo, dalam Sitepu menjelaskan bahwa hubungan internasional yang secara harfiah, dapat kita terjemahkan sebagai suatu hubungan antar bangsa (politik, hukum, ekonomi, diplomasi) namun aspek politik dan hukum merupakan dua aspek yang dominan. Aspek politik, sebagai aspek material (kepentingan militer, ekonomi dan kebudayaan) sedangkan aspek hukumnya menjadikannya sebagai aspek formal dalam artian merupakan bentuk

atas penyelesaian prosedural dari berbagai kepentingan (*interest)* (Sitepu, 2011: 20).

Hubungan bilateral yang terjalin kedua Negara antara Indonesia dan malaysia dapat dijelaskan sebagai suatu hubungan politik, budaya dan ekonomi di antara dua negara. Kebanyakan hubungan internasional dilakukan secara bilateral. Misalnya perjanjian politik-ekonomi, pertukaran kedutaan besar, dan kunjungan.

"Dalam diplomasi bilateral konsep utama yang digunakan adalah sebuah negara akan mengejar kepentingan nasionalnya demi mendapatkan keuntungan yang maksimal dan cara satu-satunya adalah dengan membuat hubungan baik dan berkepanjangan antar negara" (Rana, 2002 : 15-16).

Permasalahan TKI di luar negeri berdasarkan atas kurangnya lapangan pekerjaan di dalam negeri yang menyebabkan banyaknya angkatan kerja yang mencoba "peruntungannya" di luar negeri, namun tidak di imbangi dengan kemampuan yang memadai.

Banyak upaya yang dilakukan agar jumlah tenaga kerja diimbangi oleh perluasan lapangan pekerjaan. Tapi hal ini sulit dilakukan mengingat adanya pertumbuhan penduduk yang sangat pesat.

Pengertian Tenaga Kerja menurut Hadi Setia Tunggul, adalah sebagai berikut

> "Tenaga kerja adalah setiap orang, baik laki-laki atau perempuan yang sedang dalam dan atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat" (Tunggul, 2009 : 18).

Pengertian Tenaga Kerja Indonesia menurut *Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004* tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, adalah :

> "Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah".

Dalam pengiriman TKI ke luar negeri diperlukan suatu perjanjian agar terhindar dari permasalahan yang tidak diinginkan. Hal ini seperti dikemukakan didalam buku Hukum Imigrasi, sebagai berikut :

> "Perjanjian kerja adalah perjanjian tertulis antara Tenaga Kerja Indonesia dengan pengguna tenaga kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak" (Sihombing, 2009 : 103).

Dalam politik internasional, meski Negara merupakan aktor pelaku, namun manusia sebagai pembuat keputusan aksi dan reaksi terhadap stimulant yang berasal dari lingkungan internasional. Secara umum, objek yang menjadi kajian internasional merupakan kajian politik luar negeri. Politik luar negeri adalah merupakan sarangkaian atau seperangkat kebijaksanaan dari suatu Negara dalam interaksinya atau pergaulannya dengan masyarakat dunia yang kesemuannya didasarkan serta untuk memenuhi kepentingan nasional. Seperti yang di ungkapkan oleh Jack C. Plano dan Roy Olton, sebagai berikut :

> "Politik luar negeri merupakan suatu strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu Negara dalam menghadapi Negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional, dan setiap politik luar negeri dirancang untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional yang hendak dijangkau melalui politik luar negeri merupakan formulasi kongkret dan dirancang dengan mengaitkan kepentingan nasional terhadap situasi internasional yang sedang berlangsung serta power yang dimiliki untuk menjangkau nya. Tujuan dirancang, dipilih dan ditetapkan oleh pembuat keputusan dan

> dikendalikan untuk mengubah *(revisionist policy)* atau mempertahankan *(status quo policy)* ihwal kenegaraan tertentu di lingkungan internasional" (1999 : 5-6).

Tujuan politik luar negeri sendiri adalah untuk menjamin kedaulatan dan kemerdekaan serta memelihara kelangsungan sistem politik, sosial, dan ekonomi di wilayahnya. Adapun klasifikasi tujuan politik luar negeri menurut Holsti adalah sebagai berikut:

1. Berada pada tujuan atau tingkatan nilai yang mendorong pembuat kebijaksanaan penggunaan sumber daya Negara untuk mencapai tujuan.
2. Unsur untuk mencapai tujuan.
3. Jenis tujuan yang dibebankan atas negara lain di dalam sistem.

Menurut Rosenau dalam bukunya *The Scientific Study of Foreign Policy* dijelaskan bahwa dalam kajian politik luar negeri sebagai suatu sistem, rangsangan dari lingkungan eksternal dan domestik sebagai *input* yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara dipersepsikan oleh para pembuat keputusan dalam suatu proses konversi menjadi suatu *output*. *Input* yang dimaksud adalah merupakan suatu kebijakan, baik dalam ataupun luar negeri yang di buat oleh para pembuat keputusan. Pada kebanyakan negara, pimpinan pemerintahan (baik presiden, perdana menteri, menteri ataupun ketua) memainkan peran kunci dalam proses pembuatan keputusan (Holsti, 1980: 171- 173).

Kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara memang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat yang

diperintahnya meskipun kepentingan nasional suatu bangsa pada waktu itu ditentukan oleh siapa yang berkuasa pada waktu itu.

Kebijakan luar negeri yang diambil oleh Presiden Yudhoyono dalam upaya penyelesaian permasalahan mengenai TKI tidak lepas dari upaya diplomasi yang lakukannya.

Berdasarkan kamus *Oxford*, diplomasi dapat diartikan sebagai manajemen relasi diantara negara-negara melalui negosiasi. Negosiasi yang dimaksudkan di sini biasanya berupa negosiasi terhadap pembuatan suatu perjanjian atau persetujuan eksekutif, atau tawar menawar dengan negara lain dalam persetujuan yang ingin dicapai sesuai kepentingannya masing-masing. Diplomasi itu sendiri merupakan alat untuk melaksanakan politik luar negeri. Lester Pearson pernah berkata bahwa: "diplomasi tidak merumuskan kebijaksanaan, tetapi menyampaikan dan menjelaskan kebijaksanaan itu dan mencoba merundingkan pengaturan- pengaturan baru". Diplomasi, menurut A.M. Taylor, mencerminkan suatu upaya membuat "kebajikan dari suatu keterpaksaan" .

Menurut David W. Ziegler dalam Sitepu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan diplomasi adalah :

> "Sebagai seni dari pemecahan masalah diantara negara dengan kemampuan komunikasi tingkat tinggi melalui perwakilan tinggi dari pemerintah yang terlatih yang menekankan cara komunikasi dalam diplomasi; segala hal yang berhubungan dengan perwakilan diplomat khusus, dan prosedur formal untuk meningkatkan komunikasi tersebut" (Sitepu, 2011: 198).

Lebih lanjut, John P. Lovell memandang suatu kebijakan baik dalam negeri maupun luar negeri adalah suatu rancangan rasional yang dibentuk oleh para elit politik pembuat keputusan dan menjadi acuan bagi tindakan-tindakan

negara selanjutnya. Menurut Holsti lingkup kebijakan luar negeri meliputi semua tindakan serta aktivitas negara terhadap negara eksternalnya dalam upaya untuk memperoleh keuntungan dari lingkungan tersebut, serta hirau akan berbagai kondisi internal yang menopang formulasi tindakan tersebut (Holsti, 1990: 21). Rosenau melihat keberadaan politik luar negeri suatu negara ditentukan oleh 5 faktor penting, yaitu:

1. *Idiosyncratic*

   Semua aspek yang dimilki oleh pembuat keputusan, nilai, bakat dan pengalaman sebelumnya, yang membedakan pilihan perilaku politik luar negerinya atau perilaku kebijakannya dari pengambilan keputusan lainnya.

2. Peran atau posisi Negara

   Yang dimiliki negara dalam panggung internasional dengan mengabaikan faktor *idiosyncratic* yang ada di dalam negara tersebut.

3. Pemerintah

   Aspek-aspek dari struktur pemerintahan yang membatasi dan atau memperluas pilihan bagi para pengambil kebijakan luar negeri.

4. Non pemerintah

   Aspek-aspek diluar struktur pemerintahan yang dapat mempengaruhi perilaku luar negeri suatu negara.

5. Sistem

   Aspek-aspek seperti posisi dan kondisi geografis sebuah negara, ideologi yang dianut dan sebagainya (Rosenau, 1980:15).

Lima faktor tersebut yang disebutkan Rosenau tersebut menunujukkan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara menempatkan faktor *idiosyncratic* sebagai salah satu yang menjadi pertimbangan dalam menggambarkan kebijakan luar negeri tersebut. Disini individu memiliki peran yang cukup signifikan sebagai salah salah satu bagian dari pembuat keputusan untuk mempengaruhi hasil dari politik luar negeri tersebut.

Tujuan politik luar negeri dapat dikatakan sebagai citra mengenai keadaan dan kondisi dimasa depan suatu negara, dimana pemerintah melalui para pembuat kebijaksanaan nasional mampu menyebarkan pengaruhnya kepada negara-negara lain dengan mengubah atau mempertahankan tindakan negara lain.

Ditinjau dari sifatnya, tujuan politik luar negeri dapat bersifat konkret dan abstrak, apabila disangkutpautkan dengan adanya peranan suatu negara terhadap kondisi yang terjadi maupun yang sedang terjadi pada suatu negara.

Selain didalam studi peranan konsep umum didalam studi hubungan internasional adalah pengaruh. Konsep pengaruh didefinisikan sebagai kemampuan pelaku politik untuk mempengaruhi tingkah laku orang dalam cara yang dikehendaki oleh pelaku tersebut. Menurut Rubeinstein asumsi-asumsi dasar konsep pengaruh terdiri dari lima kategori, yaitu:

1. Ukuran perubahan konsepsi tingkah laku.
2. Ukuran interaksi yang dilakukan secara langsung (kuantitas dan kumpulan data).
3. Ukuran dari pengaruh yang ditunjukkan.
4. Studi kasus.

5. Faktor perilaku *idiosyncratic.*

Hal-hal diatas juga diperjelas oleh banyak ilmuan hubungan internasional dimana faktor perilaku *idiosyncratic* berpengaruh pada suatu hubungan luar negeri. Secara umum i*diosyncratic* adalah semua aspek yang dimiliki oleh pembuat keputusan, nilai, bakat, dan pengalaman sebelumnya yang membedakan pilihan perilaku politik luar negerinya atau perilaku kebijakannya dan pengembilan kebijakan lainnya (Rosenau, 1980 : 113-169).

Sedangkan *idiosyncratic* menurut H.C Warren adalah keseluruhan pengaturan mental seseorang pada tahap manapun dalam perkembangannya (Kartini, 1974 : 74). Ini meliputi fase-fase dari karakteristik manusia, intelektualitas, tempramen, keahlian moral, dan sikap yang telah dibangun dalam perjalanan hidup seseorang setelah memperhatikan perkembangan dalam fase-fase yang telah dibangun tersebut.

Columbis dan Wolf mendefinisikan faktor *idiosyncratic* sebagai suatu fariabel yang berkaitan dengan persepsi. Yaitu, proses yang tidak dapat dipisahkan dari individu dalam mengambil keputusan. Individu akan selalu bertindak menggunakan hal tersebut sebagai salah satu cara untuk memahami lingkungan disekitarnya. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa individu akan selalu membangun suatu gambaran psikologis (*image*) akan dunia. Gambaran inilah yang nantinya akan memberi masukan pada individu tersebut untuk menginterpretasikan lingkungan yang lebih kompleks (Mas'oed, 1994 : 19).

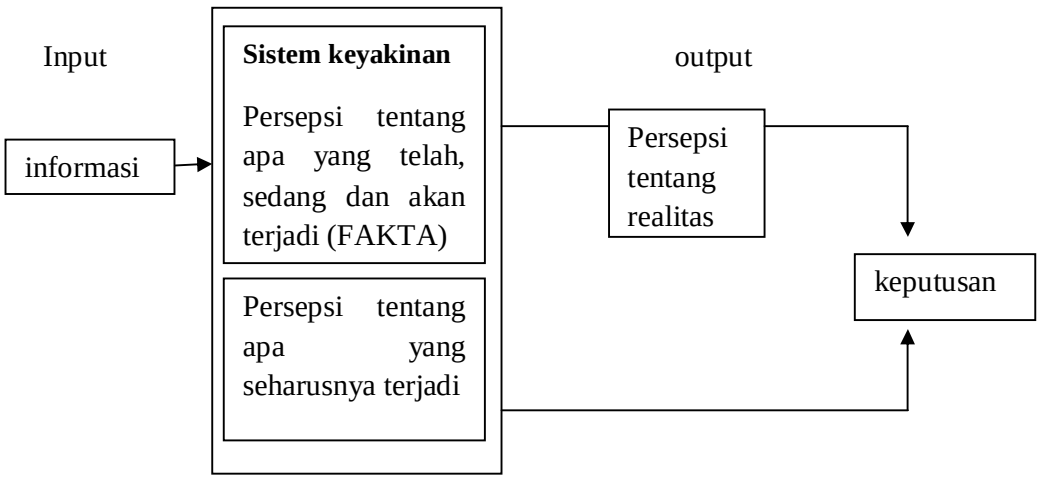
Persepsi dan interpretasi merupakan suatu proses yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan. Seorang individu akan selalu

mempertimbangkan keduanya sebelum melakukan tindakan. Hal ini didasari pada anggapan bahwa seorang individual akan membangun suatu gambaran psikologis akan lingkungan sekitarnya bahkan dunia. Gambaran yang terbentuk inilah yang akan memberi masukan dalam interpretasinya terhadap permasalahan yang lebih kompleks. Dengan sendirinya peran persepsi dan interpretasi sangat krusial dalam proses pembuatan keputusan seorang pemimpin. (Karen Mingst, 1999 : 45).

Hubungan antara persepsi dan proses pembuatan politik luar negeri dijelaskan oleh Ole Holsti. Dalam proses yang digambarkan oleh Holsti, input yang berupa informasi diolah berdasarkan fakta dan nilai oleh para pembuat keputusan yang kemudian dapat langsung dihasilkan output berupa keputusan, namun dapat juga keputusan yang dihasilkan mendapat sentuhan persepsi dari si pembuat keputusan.

Gambar 1.1

Proses Pengambilan Keputusan yang Dipengaruhi Oleh Persepsi



Sumber (Ole Holsti, 1989 : 303-304)

Untuk mempelajari *idiosyncratic* maka perlu dipelajari kepribadian seseorang tersebut. Kepribadian seseorang sering kali diklasifikasikan menjadi tipe pribadi yang tertutup dan pribadi yang terbuka. Disisi lain terdapat pula pengklasifikasian kepribadian berdasarkan tinggi rendahnya karakter dominasi seseorang. Oleh Etheredge kedua klasifikasi tersebut dihubungkan sehingga dapat ditemukan karakteristik kepribadian yang dapat mempengaruhi politik luar negeri yaitu sebagai berikut :

1. *Black leaders*

   Merupakan gabungan antara kepribadian yang tertutup dan sangat mendominasi. Individu memiliki ciri ulet dan mendominasi pada satu sentral.

2. *World leaders*

   Merupakan gabungan antara kepribadian yang terbuka dan sangat mendominasi. Ciri-ciri dari pemimpin ini adalah kecenderungan mempergunakan kekuatan militer, fleksibel, dan pragmatis.

3. *Maintainers*

   Merupakan gabungan antara kepribadian yang tertutup dan kurang mendominasi. Memiliki kecenderungan untuk mempertahankan *status quo*.

4. *Conciliators*

   Merupakan gabungan antara kepribadian yang terbuka dan kurang mendominasi. Bercirikan penolong dan kurang konsisten (Hopple, 1980 : 78-79).

Kemudian diperjelas lagi oleh Margaret G. Hermann yang menggambarkan karakter kepribadian yang ada dalam masing-masing pemimpin negara didunia, yaitu**:** *training in foreign affairs, nationalism, believe in one's own ability control events, need for power, need for affiliation, distrust of others.* (Falkowski, 1979 : 18-19).

Karakteristik individu akan menghasilkan perbedaan pada orientasi individu tersebut terhadap kepribadian politik. Berdasarkan kerangka yang diuraikan, maka Hermann dalam Falkowski memberikan karakteristik pribadi yang merefleksikan kepribadian politik, yaitu :

1. *Expansionist* dengan indikator umum : *high nasionalism, low conceptual complexity, high believe in own control, low need of affiliation, high distrus to others, low need for power.*
2. *Active independent* dengan indikator umum : *high nasionalism, high conceptual complexity, low distrust of others, high believe in own control, high need for affiliation, low need for power.*
3. *Influential* dengan indikator umum : *low nasionalism, low conceptual complexity, low distrust of others, high believe in own control, high need for affiliation, high need for power.*
4. *Mediator* dengan indikator umum : *low nasionalism, high conceptual complexity, low distrust of others, high believe in own control, high need for affiliation, high need for power.*

5. *Opportunist* dengan indikator umum : *low nasionalism, high conceptual complexity, low distrust of others, low believe in own control, low need for affiliation, low need for power*.
6. *Participative* dengan indikator umum : *low nasionalism, high conceptual complexity, low distrust of others, low believe in own control, high need for affiliation, low need for powe*r (Falkowski. 1979 : 20).

Dari tipologi *idiosyncratic* diatas maka peneliti menarik kesimpulan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono termasuk dalam kategori *active independent*, dimana di dalam diri Susilo Bambang Yudhoyono memiliki sebagian besar indikator umum dari *active independent*. Hal ini dapat dilihat dari sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang merakyat serta tidak tergesa-gesa dalam mengambil sikap kebijakan luar negeri yang menyangkut berbagai persengketaan dengan negara tetangga Malaysia serta lebih mengedepankan nilai persahabatan dan diplomasi yang baik dalam kebijakan luar negerinya.

Maka karakteristik kepribadian *active independent* merupakan karakteristik yang sesuai dengan karakter kepribadian dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan sebagian besar indikator umum yang mewakili karakteristik beliau dalam pengambilan keputusan luar negerinya.

Setiap individu yang berbeda akan menghasilkan interpretasi yang berbeda dan memutuskan hal yang berbeda pula meskipun dihadapkan pada fakta dan situasi yang sama. Individu pembuat keputusan mengkonseptualisasi suatu situasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk karakter kepribadian yang

dimiliki oleh individu. Jadi suatu perilaku individu yang memiliki peranan tertentu dalam suatu posisi sosial, diharapkan perilaku tersebut sesuai dengan harapan lingkungan sekitarnya.

Adapun pengertian pengaruh dapat didefinisikan sebagai kemampuan pelaku politik untuk mempengaruhi tingkah laku orang dalam cara yang dikehendaki oleh pelaku tersebut. Konsep pengaruh merupakan salah satu aspek kekuasaan yang pada dasarnya merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan. Pengaruh dinyatakan secara tidak langsung oleh kemampuan untuk mempengaruhi pembuat keputusan yang menentukan *out-comes* (Perwita & Yani, 2005 : 31).

Begitu juga dalam menyikapi permasalahan mengenai beberapa tenaga kerja Indonesia di Malaysia yang mengalami perlakuan yang tidak manusiawi, beliau lebih mengedepankan diplomasi di bandingkan dengan penyelesaian dengan menggunakan *power*.

1.6.2 Hipotesis

Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut diatas maka hipotesis didalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

> **"Kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyelesaikan permasalahan TKI di Malaysia yang dipengaruhi oleh *idiosyncratic* Susilo Bambang Yudhoyono yang *active independent* dapat menyelesaikan permasalahan TKI di Malaysia melalui jalur diplomasi".**

1.6.3 Definisi Operasional

1. *idiosyncratic* : Semua aspek yang dimiliki oleh pembuat keputusan, nilai, bakat dan pengalaman sebelumnya, yang membedakan pilihan perilaku politik luar negerinya atau perilaku kebijakannya dari pengambilan keputusan lainnya.
2. *Active independent* : individu yang memiliki keinginan besar untuk berpartisipasi dalam komunitas internasional dengan ciri-ciri *high nasionalisme, high conceptual complexity, low distrust of others, high believe in own control, high need for affiliation, low need for power*.
3. Hubungan luar negeri Indonesia dan Malaysia : suatu interaksi antara negara Indonesia dengan negara Malaysia. Dalam hal ini, hubungan kedua negara bertetangga ini tidak selalu harmonis dikarenakan adanya tindakan-tindakan dari negara Malaysia yang kerap melakukan pelanggaran seperti kedaulatan negara.

1.7 Metodelogi Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.7.1 Metodelogi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mempergunakan suatu cara metode penelitian yaitu:

a. Metode deskriptif analitis, yaitu metode yang bertujuan menggambarkan menganalisa dan mengklasifikasikan gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang didasarkan atas hasil-hasil pengamatan

dan beberapa kejadian dan masalah yang actual ditengah-tengah realita yang ada.

b. Metode historis analitis, yaitu metode yang digunakan terutama untuk memehami latar belakang suatu masalah yang kemudian dijadikan sebagai bahan acuan untuk menganalisa masalah yang terjadi pada masa lampau dan masa sekarang ini, yang pada akhirnya berfungsi untuk memprediksi masalah-masalah yang akan timbul dimasa yang akan datang.

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*), dengan pengumpulan data dan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan organisasi internasional terkait, buku-buku teks, makalah dan jurnal-jurnal mengenai masalah penelitian yang dilakukan oleh para ahli, serta penggunaan jasa internet melalui website yang berhubungan dengan penelitian yang dikaji, sehingga mendapatkan data-data tertulis yang dapat didokumentasikan.

1.8 Waktu dan Lokasi Penelitian

1.8.1 Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung sejak bulan Januari 2012 sampai dengan Agustus 2012, yang dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 1.1

Kegiatan Penelitian (Januari 2012-Agustus 2012)

No	Kegiatan	Waktu Penelitian (Bulan)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pengajuan Judul	■							
2.	Bimbingan Skripsi	■	■	■	■	■	■	■	
3.	Pengumpulan dan Pengolahan Data		■	■	■	■	■	■	
4.	Rencana Sidang								■

1.8.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dibeberapa lokasi, yaitu:

1. Departemen Luar Negeri Indonesia (DEPLU) Jl. Pejambon, Jakarta Pusat.
2. Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR), Jl. Ciumbeluit No. 94 Bandung.
3. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM), Jl. Dipatiukur No. 116 Bandung.
4. Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta.
5. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan (UNPAS), Jl. Lengkong Besar No. 68, Bandung.

6. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 51, Jakarta Pusat.
7. *Migrant Care*, Jl. Cipinang Pulo Maja No. 41F Kel. Cipinang Besar Utara Jatinegara, Jakarta Timur.
8. BNP2TKI, Jl. M.T. Haryono Kav. 52, Jakarta.
9. Direktorat Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia (Kementerian Luar Negeri RI), Jl. Pejambon No.6. Jakarta Pusat, 10110 Indonesia, Telp : (021) 344 15 08.

1.9 Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi atas lima bab, dimana setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang disesuaikan dengan keperluan penelitian, secara sistematis penulisan ini ditulis sebagai berikut;

Bab I, *pendahuluan*, yang terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi penelitian, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, lokasi dan waktu penelitian.

Bab II, *tinjauan pustaka*, berisi uraian dan penjelasan teori-teori serta konsep-konsep dalam studi hubungan internasional yang relevan dengan penelitian serta mendasari penelitian ini, yang terdiri dari hubungan internasional, hubungan luar negeri, hubungan bilateral, diplomasi, politik internasional, politik luar negeri, kebijakan luar negeri, *idiosyncratic*, pengaruh.

Bab III, *objek penelitian*, yang memberikan gambaran umum mengenai *idiosyncratic* Susilo Bambang Yudhoyono dan hubungan luar negeri Indonesia-Malaysia secara umum.

Bab IV, *hasil penelitian dan pembahasan*, merupakan bab yang berisikan tentang interaksi variabel-variabel yang akan dijelaskan yaitu pengaruh dari *idiosyncratic* Susilo Bambang Yudhoyono terhadap hubungan luar negeri Indonesia dengan Malaysia berdasarkan data-data yang didapat.

Bab V, *kesimpulan dan saran*, kesimpulan merupakan intisari dari hasil analisis dan interpretasi, cara penulisan atau pembahasan dirumuskan dalam bentuk pernyataan serta tertata dan padat, sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain. Informasi yang disampaikan dalam penafsiran ini bisa berupa pendapat baru, koreksi atas pendapat lama, pengukuhan pendapat lama atau menumbangkan pendapat lama. Saran merupakan kelanjutan dari kesimpulan, sering berupa anjuran yang dapat menyangkut aspek operasional maupun konseptual.